



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BARITO KUALA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala yaitu:

***“Terwujudnya Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh, Suasana Politik yang Demokratis dalam Kehidupan Masyarakat yang Tenram dan Tertib”***

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam

penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito  
Kuala Tahun 2020.

Marabahan, 24 Februari 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Barito Kuala

**Drs. NOR IPANI**  
NIP. 19630715 199003 1 009

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya dalam rangka untuk mewujudkan *Good Governance*, dimana akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja sekurang-kurangnya harus memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%.

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tahun 2018 baik fisik maupun keuangan serta pengukuran pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala secara umum dapat dicapai dengan baik, bahkan ada beberapa kegiatan yang mampu mencapai melebihi target yang direncanakan. Dari seluruh kegiatan dan sasaran yang telah dicapai perlu untuk lebih dikembangkan dan ditingkatkan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	2
C. Isu Strategis Lingkungan SKPD	7
D. Landasan Hukum	8
E. Sistematika Penyusunan	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis	10
1. Tujuan	10
2. Sasaran	10
B. Perjanjian Kinerja 2019	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja SKPD	17
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	29
C. Akuntabilitas Keuangan	33
<b>BAB IV PENUTUP</b>	38

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014). Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu implementasi *Good Governance* yang merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Dalam *Good Governance* dituntut adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Peberantasan Korupsi.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bertitik tolak dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, Rencana Kinerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala untuk tahun kinerja 2019, maka penyusunan LKIP Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

## **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Maksud penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu bentuk pelaksanaan visi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala yang dapat dilihat pada tingkat keberhasilan/kegagalan atas kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **TUGAS POKOK**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 28 tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **FUNGSI**

Sedangkan Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
2. Pelaksanaan Pembinaan Umum di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
3. Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala membawahi 1 Sekretariat dan 3 Bidang yaitu :

1. **Sekretariat** mempunyai tugas membantu Badan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (mengkoordinasikan penyusunan program, rencana dan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian).
2. **Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa** mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
3. **Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan** mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang politik dalam negeri,

ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan.

4. **Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional** mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

### **STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala terdiri dari :

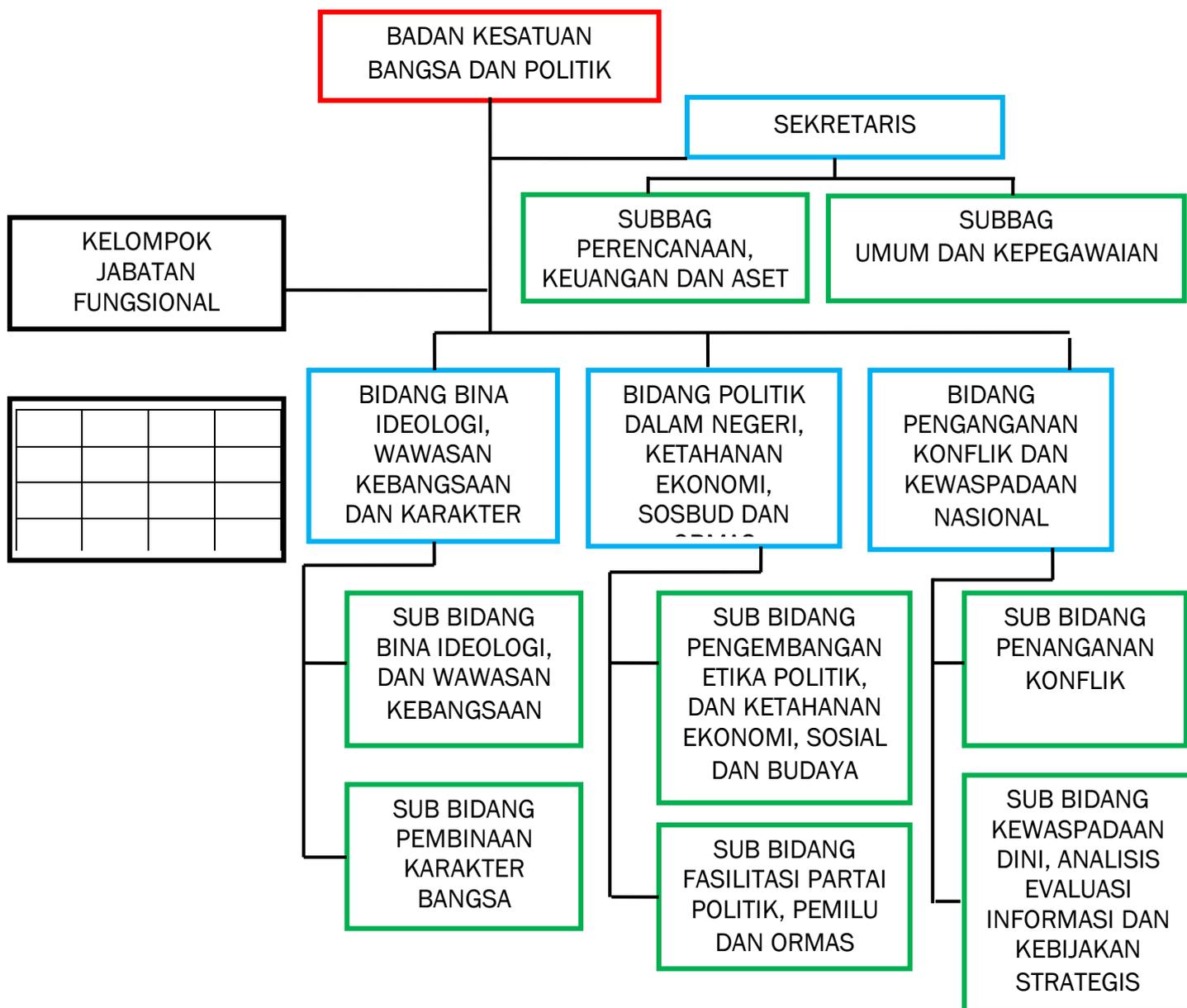
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
  - a) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - b) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
4. Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
  - a) Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
  - b) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik
5. Bidang Penanganan Konflik.

- a) Sub bidang Penanganan Konflik
  - b) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN BARITO KUALA**



### 1.3 Isu Strategis Lingkungan SKPD

Isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kurangnya minat generasi muda untuk mengikuti kegiatan kajian keilmuan yang berkaitan dengan pendidikan politik dan kesatuan bangsa.
2. Kurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pendidikan politik, wawasan kebangsaan.
3. Menurunnya nilai-nilai kegotong royongan dalam masyarakat.
4. Menurunnya penghargaan terhadap simbol - simbol kenegaraan.
5. Kurangnya sosialisasi mengenai bela negara.
6. Menurunnya rasa kebangsaan dan empati dalam masyarakat.
7. Adanya ancaman terhadap kerukunan dan solidaritas antar umat beragama.
8. Kurangnya sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Partai Politik.
9. Stigma negatif masyarakat terhadap hal-hal yang berbau politik, yang menganggap bahwa politik adalah urusannya Pemerintah dan Wakil Rakyat saja.
10. Turun naiknya tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.
11. Belum tepatnya sebagian Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
12. Ancaman penyalahgunaan/bahaya narkoba terhadap masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya masih sangat potensial.
13. Kejelasan batas wilayah administrasi dan keberadaan lahan negara yang berpotensi menimbulkan konflik antara badan

usaha dengan masyarakat maupun antar sesama masyarakat.

14. Mudahnya masyarakat terprovokasi oleh isu-isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

#### **1.5 Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Lingkungan Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja 2019 dan Perencanaan Anggaran 2019.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**

**PERENCANAAN DAN  
PERJANJIAN KINERJA**

**2.1 Perencanaan Strategis**

Berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.4/257/KUM/2018 Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala tanggal 04 Juni 2018 maka Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala adalah :

**2.1.1 Tujuan**

Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Peningkatan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan, dengan Indikator Tujuan Prosentase Desa Yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala

**2.1.2 Sasaran**

Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat, dengan Indikator Sasaran Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2019**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Peningkatan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan	Persentase Kecamatan Yang Bebas Konflik	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat	Persentase Kecamatan Yang Bebas Konflik

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja merupakan suatu pernyataan / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kecamatan Yang Bebas Konflik	Persentase	100

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengendalian Keamanan Lingkungan	127.328.000,00	APBD
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6.211.200,00	APBD
	Operasional Komunitas Intelijen daerah (KOMINDA)	45.598.000,00	APBD
	Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	45.598.000,00	APBD
<b>Total</b>		<b>204.886.200,00</b>	
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	41.484.000,00	APBD
	Pelatihan dan Pelaksanaan PASKIBRA setiap 17 Agustus	757.680.000,00	APBD
<b>Total</b>		<b>799.164.000,00</b>	
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	16.017.000,00	
<b>Total</b>		<b>16.017.000,00</b>	
Pendidikan Politik Masyarakat	Penyuluhan Kepada Masyarakat	16.317.000,00	APBD
	Forum-Forum Diskusi Politik	98.022.000,00	APBD
	Monitoring, Evaluasi dan	232.228.250,00	APBD

	Pelaporan		
<b>Total</b>		<b>346.567.250,00</b>	
Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	85.775.000,00	APBD
<b>Total</b>		<b>85.775.000,00</b>	

Pada tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala memiliki 1 Sasaran dengan 1 Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Desa Yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala.

Indikator Persentase Desa yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala didukung oleh 5 Program Utama yaitu :

- 1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Anggaran sebesar Rp. 204.886.200,00.**
- 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Anggaran sebesar Rp. 799.164.000,00.**
- 3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan Anggaran sebesar Rp. 16.017.000,00.**
- 4. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp. 346.567.250,00.**
- 5. Dukungan Kelancaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Anggaran sebesar Rp. 85.775.000,00**

Selain Program Teknis yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Program Pendukung yang dijalankan oleh Bagian Sekretariat yaitu :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Anggaran sebesar Rp. 356.884.250,00.**

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran sebesar Rp. 96.000.000,00.**
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00.**
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Anggaran sebesar Rp. 10.440.000,00**

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang tidak tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### 3.1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol disokong oleh indikator kinerja bidang-bidang dan subbidang-subbidang di bawahnya, yang secara sistem bekerja sesuai tahapan

dan ranah masing-masing untuk mencegah terjadinya konflik, sejak dari tahap potensi.

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai pencapaian indikator kinerja, perlu disampaikan terlebih dahulu gambaran alur kerja pada Badan Kesbangpol sebagai berikut :

1. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas menanamkan kekuatan ideologi, membuka wawasan kebangsaan dan membentuk karakter pribadi sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pembentukan “mindset” ini adalah sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya konflik. Dengan Ideologi Pancasila tertanam di otak, wawasan yang luas terhadap makna kebangsaan dan terbentuknya karakter sesuai kepribadian Bangsa Indonesia, maka sangat kecil peluang terjadinya konflik di masyarakat. Inilah tahap pertama pencegahan potensi konflik melalui metode pembentukan mindset/pikiran.
2. Selanjutnya, bagi warga masyarakat yang ingin melakukan kegiatan atau aktivitas sosial politik, baik itu partai politik ataupun ormas, maka Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas mempunyai tugas untuk melakukan fungsi fasilitasi warga masyarakat yang ingin melakukan kegiatan sosial dan politik. Melalui wadah fasilitasi kegiatan sosial dan politik yang tepat, maka potensi konflik bisa diredam. Inilah tahap selanjutnya pencegahan potensi konflik melalui fasilitasi penyaluran kegiatan sosial dan politik.
3. Sedangkan tahapan akhir dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas antisipasi dini potensi terjadinya konflik yang mulai terlihat dan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran pihak-pihak terkait, seperti Komite Intelejen Daerah (Kominda) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS).

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Barito Kuala Tahun 2017-2022, maka Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala adalah :

**“Persentase Kecamatan yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala”**

Indikator tersebut merupakan saran dan masukan dari Bappelitbang setelah melalui proses diskusi dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor...../Kesbangpol/2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022.

**Tabel 3.1.1**  
**Korelasi Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra pada Badan Kesbangpol**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Eselon III (Indikator Program)	Indikator Eselon IV (Indikator Kegiatan)
<b>Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Peningkatan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan</b>	<b>Meningkatkan Stabilitas Sosial Politik Dan Keamanan Di Kabupaten Barito Kuala</b>	<b>Persentase Kecamatan Yang Bebas Konflik Di Kabupaten Barito Kuala</b>	Persentase peserta yang memahami ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	1. Jumlah peserta sosialisasi 4 pilar  2. Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
			Persentase peserta yang memahami politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, peraturan perundang-	1. Jumlah peserta sosialisasi ketahanan ekonomi, social dan udaya  2. Jumlah peserta

			undangan organisasi kemasyarakatan dan akuntansi bagi parpol	<p>sosialisasi peraturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan</p> <p>3. Jumlah peserta sosialisasi akuntansi bagi pengurus parpol</p>
			Persentase konflik yang ditangani	<p>1. Jumlah dokumen rakor pengendalian keamanan lingkungan</p> <p>2. Jumlah kegiatan pengawasan orang asing</p> <p>3. Jumlah dokumen rakor kominda</p> <p>4. Jumlah peserta sosialisasi penanganan konflik sosial</p> <p>5. Jumlah dokumen rapat koordinasi FKDM</p>

Keterkaitan Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra pada Badan Kesbangpol dengan pencapaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala, yaitu **“meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”**, dengan Indikator Kinerja Kabupaten **“Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)”**.

Secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Korelasi Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kesbangpol terhadap**  
**Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala**

<b>Visi Kabupaten (sesuai RPJMD 2017-2022)</b> <b>TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA,</b> <b>MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT</b> <b>SEJAHTERA</b> <b>(BATOLA SETARA)</b>					
<b>Misi Kabupaten yang disokong :</b> <b>Misi IV. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka</b> <b>dan Melayani</b>					
Tujuan (Kabupaten)	Indikator Tujuan (Kabupaten)	Sasaran (Kabupaten)	Indikator Sasaran (IKU Kabupaten)	Sasaran Renstra Badan Kesbangpol	Indikator Sasaran (IKU Badan Kesbangpol)
<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.</b>	Opini BPK	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	Meningkatnya stabilitas sosial politik dan keamanan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kecamatan yang bebas konflik di Kabupaten Barito Kuala

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kecamatan yang bebas konflik di Kabupaten Barito Kuala	Persentase	100	100	100

*Dari Tabel diketahui dari 1 (satu) sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja capaian indikator kinerja utama yang dicapai pada indikator mencapai 100% dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala.*

Untuk memahami pencapaian indikator kinerja utama Badan Kesbangpol tahun kinerja 2019 sesuai tabel di atas, harus dijelaskan terlebih dahulu pencapaian indikator kinerja bidang-bidang dan subbidang-subbidang di bawahnya. Karena pencapaian tersebut tidak lepas dari kinerja bidang-bidang dan subbidang-subbidang di bawahnya.

### 3.1.1 Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pada tahun 2019, pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melaksanakan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, bentuknya adalah Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan; Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Upacara Peringatan Hari Bela Negara
2. Pelatihan dan Pelaksanaan PASKIBRA setiap 17 Agustus, bentuknya adalah Diklat Paskibra;

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan beserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa merupakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan untuk menanamkan Ideologi Pancasila, meningkatkan wawasan kebangsaan dan membentuk karakter bangsa. Sasaran atau objek kegiatan ini adalah para generasi muda di Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini ada perwakilan dari setiap kecamatan se Kabupaten Barito Kuala.

Diklat paskibra merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk mensukseskan HUT Kemerdekaan RI Tahun 2019. Kegiatan ini melibatkan putra putri yang terpilih pada saat seleksi dan merupakan perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala dan dilatih oleh pelatih gabungan dari Kodim 1005 Marabahan dan Polres Barito Kuala. Secara umum kegiatan ini berjalan dengan sukses dan lancar.

Sedangkan peringatan Hari Bela Negara dilaksanakan dalam bentuk upacara di halaman Kantor Bupati Barito Kuala pada tanggal 19 Desember 2019.

Dari semua pelaksanaan kegiatan di atas, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan**  
**dan Karakter Bangsa Tahun 2019**

No.	IKU Eselon III	Target 2019	Capaian 2019	Target 2022
	IKU Eselon IV			
1.	Persentase peserta yang memahami ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	100 %	100%	100%
2	Jumlah peserta sosialisasi 4 pilar kebangsaan	60 orang	60 orang	60 orang
	Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	60 orang	60 orang	60 orang

Sumber data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

### 3.1.2 Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat

Pada tahun 2019, pada Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat melaksanakan Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui beberapa kegiatan, yaitu :

1. Penyuluhan kepada masyarakat, bentuknya adalah sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik, bentuknya adalah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat; Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Perempuan dan Pemilih Pemula; Sosialisasi Akuntansi bagi Pengurus Partai Politik; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu bagi Pengurus Partai Politik, Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat; dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu;

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Semua kegiatan yang dilaksanakan tersebut secara umum berjalan dengan baik dan lancar dan memenuhi target yang ingin dicapai. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**pada Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial**  
**Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan**  
**Tahun 2019**

No.	IKU Eselon III	Target 2019	Capaian 2019	Target 2022
	IKU Eselon IV			
1.	Persentase peserta yang memahami politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, peraturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan dan akuntansi bagi parpol	100 %	100%	100%
	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	60 orang	60 orang	60 orang
2	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan	60 orang	60 orang	60 orang
	Jumlah peserta sosialisasi akuntansi bagi pengurus parpol	50 orang	50 orang	50 orang

Sumber data : Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

### 3.1.3 Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pada tahun 2019, pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional melaksanakan Program Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, bentuknya berupa Rapat Koordinasi;
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, bentuknya pengawasan orang asing di Barito Kuala
3. Operasional Kominda, bentuknya berupa Rapat koordinasi;
4. Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, bentuknya berupa Sosialisasi dan juga Rapat Koordinasi.

Semua Program dan kegiatan tersebut secara umum bisa terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang ingin dicapai. Adapun capaiannya sesuai indikator kinerja utama eselon 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**  
**Tahun 2019**

No.	IKU Eselon III	Target 2019	Capaian 2019	Target 2022
	IKU Eselon IV			
1.	Persentase konflik yang ditangani	100 %	100%	100%
2	Jumlah dokumen rakor pengendalian keamanan lingkungan	3 dok	3 dok	3 dok
	Jumlah kegiatan pengawasan orang asing	4 dok	4 dok	4 dok
	Jumlah dokumen rapat koordinasi Kominda	4 dok	4 dok	4 dok

Jumlah peserta Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial	60 Orang	60 Orang	60 Orang
Jumlah dokumen rapat koordinasi FKDM	6 dok	6 dok	6 dok

*Sumber data : Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional*

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja utama seluruh bidang dan subbidang tersebut, maka capaian indikator kinerja utama bisa mencapai 100%. Dengan 0 (nol) konflik yang terjadi sepanjang tahun 2019 di Kabupaten Barito Kuala.

Penanganan konflik di Kabupaten Barito Kuala mengutamakan penanganan secara preventif, artinya melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya konflik sejak dari penanaman kesadaran di masyarakat, fasilitasi kelembagaan, dan antisipasi sejak tahap potensi.

Salah satu langkah preventif dan antisipasi adalah dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Polres, Kodim, Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan.

Namun semua itu juga dibantu dengan peran serta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam rangka koordinasi pencegahan tindakan terorisme/kriminal dalam rangka memelihara ketentraman, keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

**Tabel 3.1.4**

**Capaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Berdasarkan Persentase  
Tahun 2019**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	0
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	0

*Dari Tabel 3.1.4 diketahui Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase mencapai 100 % dengan predikat Tercapai/Sesuai Target.*

**Tabel 3.1.5**

**Capaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Berdasarkan Kategori  
Tahun 2019**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

*Dari Tabel 3.1.5 diketahui Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian lebih dari 90.*

### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor 188.4/11/Kesbangpol/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

<b>Sasaran Strategis 1</b>	<b>Meningkatnya Stabilitas sosial politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala</b>	<b>1 Indikator</b>
----------------------------	--	--------------------

**Tabel 3.2.2**

**Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala	1	100	Sesuai target

**Tabel 3.2.3**

**Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala	1	100	-	-	-	-	Sangat Baik

Tabel 3.2.4

**Pencapaian Target Sasaran Strategis  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala	1	100	-	-	1	100	-	-

**Sasaran Strategis 1.  
Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala**

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala” maka ada indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase Kecamatan Yang Bebas Konflik di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 3.2.5

**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi Capaian  
Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih Capaian	Ket.
			Capaian	Capaian		
1.	Persentase Kecamatan yang Bebas Konflik Di Kabupaten Barito Kuala	Persentase	100	100	0	....

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran (1) tidak terjadi peningkatan capaian tahun tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dengan kata lain tidak ada selisih capaian.

Keberhasilan capaian Indikator Sasaran Tahun 2019 pada sasaran (1) disebabkan bahwa selama ini upaya untuk melakukan pencegahan munculnya Potensi Konflik dan terjadinya Konflik Horizontal dan Vertikal dimasyarakat disemua Desa di Kabupaten Barito Kuala selalu diusahakan secara sinergis dengan melibatkan semua pihak terkait mulai dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Jajaran Pemerintahan Desa dan Kecamatan, serta Jajaran SKPD terkait dan Instansi Vertikal di Daerah.

Pelibatan seluruh Stakeholder terkait tersebut dilakukan baik melalui berbagai forum relevan, seperti Tim Komite Intelijen Daerah (KOMINDA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Tabel 3.2.6

**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Target	Capaian	Ket.
			2019	Akhir Renstra	(%)	
1.	Persentase Kecamatan yang Bebas Konflik Di Kabupaten Barito Kuala	Persentase	100	100	100	....

*Capaian sasaran berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2019 dengan capaian akhir Renstra mencapai 100 % karena capaian 2019 sudah mencapai target yang ditetapkan pada capaian Renstra.*

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kesatuan dan Bangsa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 4.415.784.670,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.902.382.110,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,37 %.

Komposisi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2019, sebagai berikut :

**Tabel 3.22****Komposisi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun Anggaran 2019**

(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	2.491.733.700,00	2.384.807.168,00	95,71
2	Belanja Tidak Langsung	1.924.050.970,00	1.575.506.242,00	81,88
<b>Jumlah</b>		4.415.784.670,00	3.960.313.410,00	89,69

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Tahun Anggaran 2019.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 95,71% terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar 81,88% disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.621.409.450,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.574.093.580,00 atau 97,08 % dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.23****Pagu dan Realisasi Anggaran  
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis  
dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala	1.621.409.450,00	1.574.093.580,00	97,08

<b>Jumlah</b>	1.621.409.450,00	1.574.093.580,00	97,08
---------------	------------------	------------------	-------

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Tahun Anggaran 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019.

Selain itu, terdapat pula program dan kegiatan tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2019. Realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja Program/Kegiatan Tugas Pembantuan pada tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Program Pembantuan SKPD	Capaian Tahun 2019		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	362.884.250,00	334.697.188,00	92,23
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	422.000.000,00	401.310.500,00	95,10
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	64.265.900,00	85,69
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.440.000,00	10.440.000,00	100

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.25

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala  
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala	1	100	3.960.313.410,00	89,69
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>3.960.313.410,00</b>	<b>89,69</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari Capaian Kinerja Sasaran menunjukkan pencapaian 89,69 % Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.26

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran  
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Barito Kuala	1	100	89,69	1,46
	<b>Jumlah</b>	1	100	89,69	1,46

**BAB IV****PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 hasil reviu yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 1 (satu) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau sesuai target. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.415.784.670,00,- sedangkan realisasi anggaran

mencapai Rp. 3.960.313.410,00,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,69%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 455.471.260,-. Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian sasaran tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.621.409.450,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.574.093.580,00,- atau 97,08%.